

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH DENGAN PENDEKATAN
VALUE FOR MONEY PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH (BPKAD) PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI



NAMA : Desi Ratna Sari

NIM : 222016052

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

SKRIPSI

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH DENGAN PENDEKATAN
VALUE FOR MONEY PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH(BPKAD) PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang**



NAMA : Desi Ratna Sari

NIM : 222016052

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Desi Ratna Sari
NIM : 222016052
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendekatan *Value For Money* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang Agustus 2020



Desi Ratna Sari

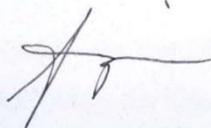
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Kinerja Keuangan Daerah Dengan
Pendekatan *Value For Money* pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Provinsi Sumatera Selatan
Nama : Desi Ratna Sari
NIM : 222016052
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

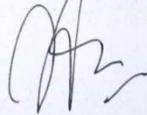
Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, 16 September 2020

Pembimbing I,



HJ. Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si
NIDN/NBM: 0228115802/1021961

Pembimbing II,



HJ. Ida Zuraidah, S.E., Ak., M.S
NIDN/NBM: 0224017201

Mengetahui
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri, S.E., M.Si., AK., CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

- *Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung (Qs. Al Imran: 73)*
- *Dibalik anak yang sukses, terdapat do'a orang tua yang hebat.*
- *Jangan jadikan kesalahan membuat kita jadi terpuruk, tapi jadikanlah kesalahan tersebut menjadi jalan untuk mengapai kesuksesan.*

(Desi Ratna Sari)

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- *Ayah dan Ibu Yang Selalu Mendo'akanku*
- *Adik-Adikku dan Keluargaku*
- *Pembimbing Skripsi*
- *Dosen-Dosen FEB UMP*
- *Sahabat Terbaik dan Teman-Teman Seperjuangan*
- *Almamaterku*



PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah rabbil'alaamiin, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan berjudul **“Analisis Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendekatan Efektivitas, Efisiensi, dan Ekonomis Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan”** dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi inimerupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan penuh rasa hormat, cinta, kasih, sayung dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan terkhusus kepada kedua orang tuaku, Rudi dan Rogaya beserta adik-adikku Hendi, Kristinah, dan Amira yang sangat berjasa dalam mendidik, mendoakan, memberi semangat dan motivasi, serta telah membesarkan penulis dengan penuh cinta, kasih sayang tanpa keluah kesah. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hj. Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si selaku pembimbing I dan Ida Zuraidah, S.E., Ak., M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, semangat, dan saran-saran dengan ikhlas dan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, hal ini mengingat keterbatasan penulis, baik dari segi ilmu ataupun pengalaman. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dorongan serta motivasi dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri, S.E., M.Si., Ak., CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku ketua dan sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si dan Ibu Ida Zuraidah, S.E., Ak., M.Si selaku pembimbing skripsi.
5. Bapak Rahmad Basuki, S.E., Ak., M.Ak., selaku Pembimbing Akademik
6. Bapak Eman Satria, S.E., Ak., MM., yang selalu membantu dan memberikan dukungannya.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Pegawai di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan izin penelitian sehingga selesainya penyusunan skripsi ini.

9. Ayah dan Ibuku Rudi dan Rogaya serta adik-adiku Hendi, Kristinah, dan Amira terimakasih atas segala cinta dan kasih sayangnya, do'a yang selalu dipanjatkan untuk kebaikan dan kebahagiaanku, dan terimakasih telah menjadi penghilang kesedihanku, penyemangatku dan menjadi guru terbaikku.
10. Sahabat-sahabatku Ana Marlina dan Indah Nispi Handayani terimakasih atas dukungan suka duka dan kebersamaan menampung air mataku, tawaku dan segalanya 4 tahun ini.
11. Orang-orang terbaik yang aku miliki Nurul, Anjani, Vera, Thia, Laura selalu memotivasi dan menyemangatiku, dalam proses penyusunan skripsi.
12. Sahabat dan Teman-teman KKN 53 Posko 145 serta Angkatan 2016 dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalamualikum Wr. Wb

Palembang, 27 Agustus 2020
Penulis

Desi Ratna Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN/COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xi
HALAMAN GAMBAR	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	11
1. Kinerja Keuangan	11
a. Definisi Kinerja Keuangan	11
b. Pengukuran Kinerja	12
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	16
a. Definisi Laporan Keuangan Pemerintah Daeah	16
b. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	18
c. Dasar Hukum Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	22
d. Karakteristik Kualitatif LKPD	23
e. Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	26

3.	<i>Value For Money</i>	27
a.	Pengertian <i>Value For Money</i>	27
b.	Manfaat <i>Value For Money</i>	28
c.	Pengukuran <i>Value For Money</i>	29
1.	Efektivitas	29
2.	Efisiensi.....	32
3.	Ekonomis	35
4.	<i>Outcome</i>	37
4.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	38
a.	Definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	38
b.	Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	40
c.	Tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	42
B.	Penelitian Sebelumnya.....	43

BAB III. METODE PENELITIAN

A.	Jenis Penelitian.....	48
B.	Lokasi Penelitian.....	49
C.	Operasionalisasi Variabel	49
D.	Data yang Diperlukan	50
E.	Metode Pengumpulan Data.....	50
F.	Analisis Data dan Teknik Analisis.....	52
1.	Analisis Data.....	52
2.	Teknik Analisis Data	52

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Hasil Penelitian	53
1.	Sejarah Singkat Tentang BPKAD Provinsi Sumatera Selatan	53
2.	Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Sumatera Selatan	54
3.	Visi dan Misi BPKAD Provinsi Sumatera Selatan	57
a.	Visi	57
b.	Misi	57
B.	Pembahasan Hasil Penelitian	57
1.	Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah Pada Tahun	

2015-2019 Pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan	
Ditinjaukan dari segi Efektivitas	58
a. Perhitungan Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah	
Provinsi Sumatera Selatan	58
b. Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah Provinsi	
Sumatera Selatan	61
2. Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah Pada Tahun	
2015-2019 Pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan	
ditinjaukan dari segi Efisiensi.....	66
a. Perhitungan Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Provinsi	
Sumatera Selatan	66
b. Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Provinsi	
Sumatera Selatan	69
3. Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah Pada Tahun	
2015-2019 Pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan	
ditinjaukan dari segi Ekonomi	71
a. Perhitungan Ekonomis Kinerja Keuangan Daerah	
Provinsi Sumatera Selatan	71
b. Rasio Ekonomis Kinerja Keuangan Daerah Provinsi	
Sumatera Selatan	74
4. Analisi Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah Pada Tahun	
2015-2019 Pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan	
ditinjaukan dari segi <i>Outcome</i>	76
a. Peran Retrospektif	76
b. Peran Prospektif	78

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	6
Tabel I.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan	7
Tabel II.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian sebelumnya	47
Tabel III.1	Operasional Variabel Penelitian	49
Tabel IV.1	Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sumatera selatan.....	61
Tabel IV.2	Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	70
Tabel IV.3	Rasio Ekonomis Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	74
Tabel IV.4	Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019 (Pendapatan Pajak Daerah).....	77
Tabel IV.5	Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019 (Pendapatan Retribusi Daerah)	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1	Struktur Organisasi	51
-------------	---------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Lampiran 2 : Fotokopi Surat Riset.
- Lampiran 3 : Fotokopi Surat Keterangan Selesai Pengambilan Data
- Lampiran 3 : Fotokopi Surat Keterangan dan Tempat Penelitian.
- Lampiran 4 : Fotokopi Bebas Plagiat.
- Lampiran 5 : fotokopi Aktivitas Bimbingan.
- Lampiran 6 : Fotokopi Sertifikat AIK.
- Lampiran 7 : Fotokopi Sertifikat TOEFL.
- Lampiran 8 : Fotokopi Sertifikat Komputer Windows, Microsoft Word dan Microsoft Excel.
- Lampiran 9 : Fotokopi Sertifikat MYOB.
- Lampiran 10 : Biodata Penulis.

ABSTRAK

Desi Ratna Sari / 222016052 / Analisis Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendekatan *Value For Money* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendekatan *Value For Money* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan. Tujuannya untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendekatan *Value For Money* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif. Tempat penelitian dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumen. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan pendekatan Efektivitas, Efisiensi, Ekonomis dan *Outcome*

Kata kunci: Efektivitas, Efisiensi, Ekonomis dan *Outcome*

ABSTRACT

Desi Ratna Sari / 222016052 / The Analysis of Regional Financial Performance with a Value For Money Approach at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD), South Sumatra Province.

The formulation of the problem in this study was how the measurement of regional financial performance with a value for money approach at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of South Sumatra Province. The objective of this study was to determine the Regional Financial Performance with a Value For Money Approach at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of South Sumatra Province. This research used descriptive research. The research site was conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD), South Sumatra Province. The data used in this study was secondary data, while the data collection method in this study was documents. The analysis technique used was qualitative analysis. The results of the analysis showed that the effectiveness, efficiency, economy and outcome approaches are used

Keywords: *Effectiveness, Efficiency, Economical and Outcome*

PENGESAHAN
NO 296 / Abstract I.B LMP/1^A / 20 20
Telah di Koreksi oleh
Lembaga Bahasa
Universitas Muhammadiyah Palembang 90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Organisasi pemerintah merupakan salah satu bentuk organisasi nonprofit yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum yang dapat berupa peningkatan keamanan, peningkatan mutu pendidikan atau peningkatan mutu kesehatan dan lain-lain. Lembaga pemerintah melakukan berbagai bentuk pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan disatu sisi dan disisi lain lembaga ini harus melakukan berbagai upaya untuk memperoleh penghasilan, salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penghasilan adalah dengan mengoptimalkan Pendapatan Daerah. (Jaenuar, 2016)

Revisinya UU No. 23 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan perundang-undangan yang berhubungan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Otonomi daerah pemerintah daerah diberikan keleluasan dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran yang sesuai dengan kepentingan daerahnya masing-masing. Daerah diberikan kewajiban dan kewenangan untuk menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Penyelenggaraan pemerintah daerah tidak lepas dari adanya penggunaan dan pemanfaatan anggaran serta pendapatan daerah. Setiap tahun juga selalu saja pemerintah daerah mempersiapkan perencanaan anggaran atau yang sering disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran pemerintah terkait dengan penentuan jumlah alokasi dana untuk setiap program dan aktivitas yang menggunakan dana milik masyarakat. Anggaran merupakan alat perencanaan target yang harus dicapai oleh pemerintah, serta sebagai alat untuk pengendalian alokasi sumber dana publik yang disetujui oleh legislatif untuk nanti dibelanjakan.

Menurut Tampubolon (2005: 45) dalam Jaenuri (2016) mengemukakan Kinerja Keuangan adalah “Pengakuan kinerja instansi yang ditimbulkan sebagai akibat dari proses pengambilan keputusan manajemen karena menyangkut pemanfaatan modal, efisiensi dan rentabilitas dari kegiatan instansi”. Kinerja keuangan akan menunjukkan penilaian hasil kinerja yang telah dicapai dalam suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya yang dapat dibandingkan bagaimana kecenderungannya.

Pengukuran Kinerja secara umum adalah pengukuran terhadap kinerja yang dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat penyimpangan atau deviasi dari rencana yang telah ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan (Hery, 2019: 73). Artinya pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya pada masa yang akan datang.

Kepentingan urusan publik menjadikan indikator pengukuran kinerja sebagai alat evaluasi terhadap kinerja dan kemampuan daerah agar Pemerintah terpacu untuk meningkatkan kinerja ditahun berikutnya dan memulihkan kinerja dengan pembanding skema kerja dan pelaksanaannya, serta pengukuran kinerja juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan yaitu kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik telah dikelola secara efektivitas, efisien dan ekonomis.

Value For Money merupakan anggaran yang berbasis kinerja menuntut adanya *output* yang optimal atas pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomis, efisien, efektif. Efektivitas adalah menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efisiensi merupakan suatu rasio perhitungan perbandingan antara *input* yang seminimalnya untuk mencapai *output* yang semaksimalnya. Efisiensi diukur dengan rasio antara *output* dengan *input*. Semakin besar *output* dibandingkan *input*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Ekonomis merupakan hubungan antara nilai uang (pasar) dan masukkan atau praktik pembelian barang dan jasa pada kualitas yang diinginkan dan pada harga terendah. Pengukuran ekonomis hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan.

Menurut Ramli (2016: 5) ada beberapa cara untuk mengukur kinerja keuangan daerah salah satunya adalah dengan menggunakan Rasio Keuangan Daerah. beberapa rasio yang bisa digunakan adalah: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan rasio DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*).

Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah akan menunjukkan kemampuan Daerah dalam menjalankan tugasnya. Semakin tinggi rasio efektivitas yang dicapai maka kemampuan daerah dapat dikategorikan efektif, dan demikian pula sebaliknya. Efektivitas menunjukkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan Pemerintah Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Pendapatan Daerah itu sendiri adalah semua Penerimaan Daerah yang berasal dari sumber ekonomi suatu daerah masing-masing. Komponen Pendapatan Daerah ada empat yaitu: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai seluruh kegiatan pemerintah, dari besar kecilnya Pendapatan Daerah dibandingkan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain, baik bantuan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi maupun pinjaman ekstem. Rasio kemandirian akan menunjukkan semakain tinggi rasio

kemandirian yang dicapai maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak lain akan semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jl. Kapten Arivai No. 51 Palembang merupakan unsur penunjak unsur pemerintah dibidang keuangan yang menjadi wewenang daerah di kota palembang. Visi misi BPKAD yaitu terwujudnya akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mendukung Sumsel Sejahtera lebih maju dan berdaya saing internasional antara lain menciptakan kehandalan laporan keuangan dan pengamatan asset daerah, dan menciptakan pelayanan prima keuangan dan asset daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan sendiri menjadi sangat strategis. BPKAD Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari enam bagian bidang dan dua belas Sub Bagian Pengelola dan Aset Daerah yang bertugas yaitu Kepala Badan, Bidang Sekretaris, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Milik Daerah.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Indrayani dan Khairunnisa (2018) dengan judul Analisis Pengukuran Kinerja Dengan menggunakan Konsep *Value For Money* pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi kasus pada DPKAD Kota Lhokseumawe periode 2014-20116). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe dapat menerapkan *value for money* sebagai konsep pengukuran kinerjanya, karena dengan konsep *value for money* pemerintah dapat mengukur kinerja organisasi dengan lebih komprehensif,

sehingga pemerintah dapat meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang.

Penelitian yang sama dilakukan oleh Wardiman Zain (2018) dengan judul Analisis Pengukurang Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan *Value For Money* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng selama tahun 2012-2016 dikatakan ekonomis karena memiliki rata-rata rasio ekonomi dibawah 100% sebesar 93,91%. Dari segi efisiensi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng selama tahun 2012-2016 yaitu efisien karena memiliki rasio efisiensi sebesar 96,85%. Dari segi efektivitas rata-rata rasio dari tahun 2012-2016 sebesar 96,05% yang menunjukkan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng selama tahun 2012-2016 tidak efektif.

Berikut informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagai berikut :

Tabel I.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2015-2019

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio
2015	9.722.999.846.804,09	8.360.152.393.841,95	86%
2016	6.999.258.016.791,91	6.582.780.929.676,33	94%
2017	8.911.476.779.409,71	8.195.968.131.799,96	92%
2018	9.196.477.924.456,14	9.141.371.395.099,97	99%
2019	9.783.467.604.746,55	9.215.916.111.901,73	94%

Sumber : BPKAD, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran pendapatan tersebut mengalami naik turun atau fluktuatif. Pengelola

keuangan dalam penyusunan anggaran belum optimal karena penerimaan anggaran cenderung kadang meningkat dan menurun sesuai dengan sumber keuangan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah akibat dari perkembangan daerah dan redistribusi daerah, pemahaman tentang undang-undang dan peraturan yang masih lemah. Penyebab meningkatnya penerimaan anggaran dikarenakan semakin bertambahnya jumlah perusahaan dan sektor-sektor pembangunan perusahaan yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, penyebab menurunnya penerimaan anggaran dikarenakan kurangnya realisasi pendapatan asli daerah.

Tabel I.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2015-2019

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio
2015	5.609.583.728.017,00	4.496.851.160.889,22	80%
2016	4.496.474.573.009,91	4.094.471.321.477,03	91%
2017	6.439.523.470.869,00	5.788.552.526.667,59	90%
2018	7.426.770.057.057,95	6.763.760.533.371,09	91%
2019	7.074.829.339.229,22	6.418.398.930.897,59	91%

Sumber : BPKAD, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran belanja tersebut mengalami naik turun atau fluktuatif. Pengelola keuangan anggaran belum optimal, karena terdapat aktivitas yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang diharapkan, adanya pengadaan barang dan jasa yang melebihi kebutuhan, adanya pemborosan keuangan, dan tingginya harga pada penyusunan anggaran. Sehingga mengakibatkan kelalaian dalam perencanaan dan penganggaran program. Penyebabnya pada fungsi-fungsi terkait seperti fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi

yang tidak berjalan sebagaimana semestinya sesuai dengan teori fungsi anggaran dan pendapatan belanja daerah.

Sebagai salah satu aparaturnya lembaga di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mencakup seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Dampak bagi instansi BPKAD adalah kinerja badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menjadi kurang berjalan dengan baik dalam mengelola keuangan daerah sehingga pelaksana APBD akan berdampak secara langsung terhadap pelaksanaan pembangunan pada daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul : **“Analisis Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendekatan *Value For Money* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengukuran Kinerja

Keuangan Daerah Dengan Pendekatan *Value For Money* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendekatan *Value For Money* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini sebagai bukti empiris yang ada tentang Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Pendekatan Efektivitas, Efisiensi dan Ekonomis pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Selatan pada tahun mendatang.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dan pertimbangan kebijakan bagi pemerintah dalam mengelola Kinerja Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulis dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Selemba Empat.
- Abdul Halim dan Muhammad Iqbal. 2019. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan. 2019. *Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2018*. Provinsi Sumatera Selatan.
- Deddi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra, dan Maulidah Rahmawati. 2019. *Akuntansi Pemerintah*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Fahmi, Irham. 2018. *Manajemen Kinerja*. Bandung: Alfabeta.
- Faud, M. Ramli. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Cetakan Pertama. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Hery. 2019. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT Grasindo
- H. Izudin, Syaparudin dan Syamsuddin H.H. (2013). *Kinerja Keuangan Daeran Dan Hubungan Dengan Silpa Di Kabupaten Bungo*. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah. 1(1): 1-8.
- Indra Bastian. 2017. *Akuntansi Managemen Sektor Publik*. Jakarta: Selemba Empat.
- Indrayani dan Khairunnisa. 2018. *Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016)*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. ISSN : 2301-4717. Volume 6, Nomor 1, Februari 2018.
- Januari. 2016. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Bojonegoro dan Jombang Tahun 2010-2014*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol 14 (01): 34-35.
- Nurlan Darise. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Penerbit Indeks.

- Mahmudi. 2019. *Manajemen Kinerja keuangan*. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mahmudi, 2010. *Managemen kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- Mardiasmo. 2018 . *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mentari Yosephen Sijabat, Choirul Saleh, & Abdul Wachid. (2013). *Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jurnal Administrasi Publik. 2(32):236-242.
- Pemerintah Indonesia. 2015. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *tentang Pemerintah Daerah*. Lembaran RI Tahun 2015 No. 9. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 *tentang Keuangan Negara*. Lembaran RI Tahun 2003 No. 17. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 25. Tahun 1999 *tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Lembaran RI Tahun 2004 No. 33. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2019. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Penerbit Pustaka Baru Press. Yogyakarta.